

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KUTOREJO
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Mojokerto, Februari 2026

PLT. CAMAT KUTOREJO

KUKUH RADIDTYO, S.H., M.H
PEMBINA
NIP. 19780306 200312 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Stuktur Organisasi	5
1.4. Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Penjenjangan Strategis	11
2.2. Indikator Kinerja Utama	12
2.3. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja	26
3.2. Analisis Kinerja	36
3.3. Prestasi Kinerja Lainnya	38
3.4. Akuntabilitas Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	58

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Camat Kutorejo Tahun 2025 dengan menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 4 kinerja lainnya dengan 6 indikator kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 4 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 4 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	93,75	92,49	98,65%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
----	-----------------	-------------------	--------	-----------	-----------

1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,85	83,41	100,67%
		1.1	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	92,48	93,38%
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN	84,8 (Tinggi)	84,67 (Tinggi)	99,84%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	1 Inovasi	33,33%	

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,75	92,49	98,65%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Capaian Kunerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,85	83,41	100,67%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan Yang Diselenggarakan Sesuai Standar	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase HASil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 2.756.402.490,00 atau sebesar 92,48% dari anggaran sebesar Rp. 2.980.400.000,00.

Capaian kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 diharapkan dapat terus meningkat dai tahun sebelumnya. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maka setiap pejabat dan pelaksana wajib menyusun laporan kinerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* maka diperlukan adanya sebuah penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas dan terukur sehingga dapat terlaksana pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta bebas dari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sangat kental dengan kegiatan yang menyangkut khalayak banyak baik sebagai penyusun maupun pelaksana kebijakan publik, sehingga dibutuhkan sebuah pengontrol yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Alat kontrol itu dapat berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satu ciri *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 adalah akuntabilitas. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja sertahasil-hasil yang telah dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Mojokerto No. 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
5. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Kutorejo dalam menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. Gambaran Umum

Kecamatan Kutorejo kabupaten Mojokerto berlokasi di Jl. Mayjen H. Soemadi No 108 Kutorejo Kecamatan Kutorejo kabupaten Mojokerto. Kecamatan Kutorejo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Terletak sekitar 15 kilometer di selatan pusat kota Mojokerto, Kecamatan Kutorejo dikenal sebagai daerah dengan kekayaan budaya, potensi pertanian, dan suasana pedesaan yang asri. Pada tahun 2025, Kutorejo terus berkembang menjadi wilayah yang lebih modern tanpa kehilangan identitas tradisionalnya.

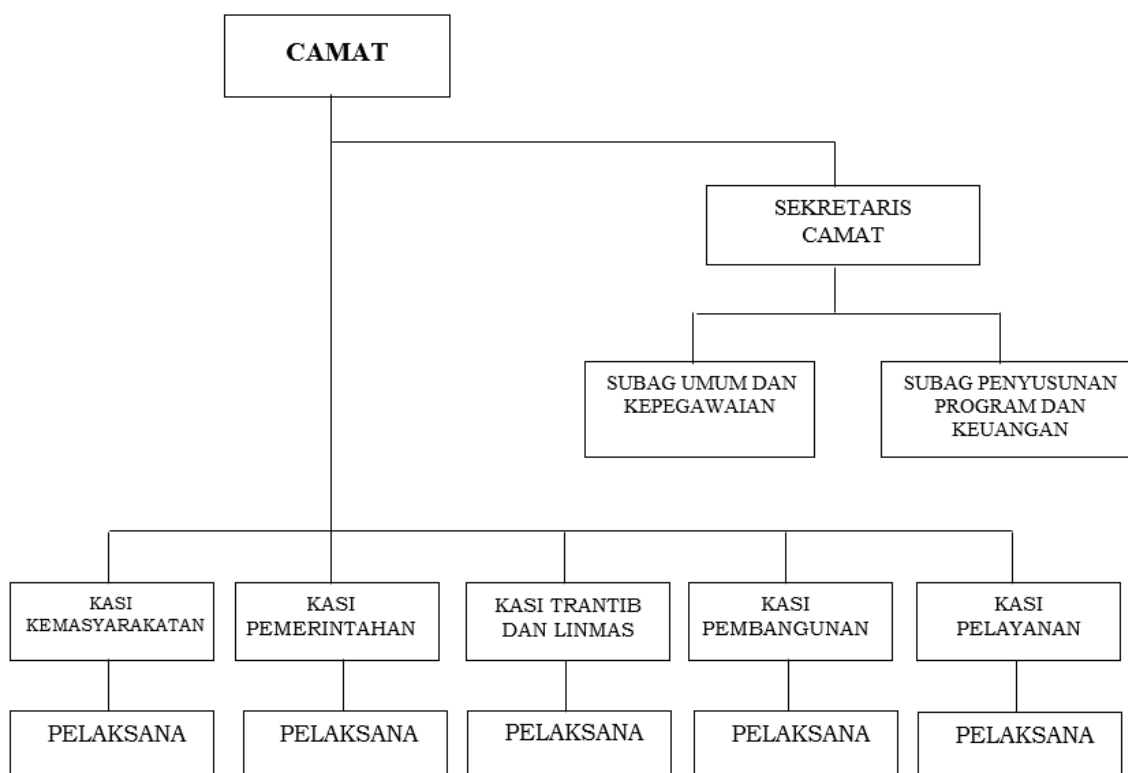
Wilayah Kecamatan Kutorejo terletak pada ketinggian antara 46,12 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Kutorejo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan bangsal Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Secara administratif Kecamatan Kutorejo terdiri dari 17 Desa , 108 Dusun , 358 RT serta jumlah penduduk sebesar 67.380 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto).

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kutorejo berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.
- h. Pelaksana



Aset merupakan seluruh sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kecamatan Kutorejo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi maupun sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh. Aset menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah.

Untuk mendukung Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutorejo juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 291 buah / set, yang terdiri dari 7 jenis bidang barang yaitu gedung dan bangunan, kendaraan dinas operasional dan/kendaraan dinas bermotor beroda dua, meubeler, alat rumah Tangga lainnya, alat pendingin, personal computer, peralatan personal computer, peralatan video dan studio, peralatan audio.

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kutorejo

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN/ KONDISI
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Pendopo	1 unit	Baik
4	Televisi	3 unit	Baik
5	Lemari Es / Lemari Pendingin	2 unit	Baik
6	Station Wagon	1 unit	Baik
7	Sepeda Motor (di desa)	17 unit	Baik
8	Mesin Absensi	1 unit	Baik
9	Sepeda Motor (Babinsa dan Babinkamtibmas)	34 unit	Baik
10	Almari	8 unit	Baik
11	Meja Pelayanan	1 Set	Baik
12	Komputer	7 unit	Baik
13	Laptop	10 unit	Baik
14	Printer	10 unit	Baik
15	Camera	1 unit	Baik
16	Meja kerja	20 unit	Baik
17	Kursi rapat	120 unit	Baik
18	Meja Rapat	6 unit	Baik
19	Kursi Kerja	23 unit	Baik
20	AC	15 unit	Baik
21	Sound System	1 unit	Baik
22	Pesawat telepon	1 unit	Baik
23	Kursi Tamu	3 unit	Baik
24	Proyektor	2 Unit	Baik
25	CCTV	1 Set	Baik
26	Mesin Barcode	1 Unit	Baik

Sumber data Kecamatan Kutorejo tahun 2025

1.3. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menyikapi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutorejo, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan dan isu strategisnya sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kutorejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemantapan dan pengembangan kawasan Agropolitan	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	Masih kurangnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kawasan Peternakan	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Masih kurangnya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Disparitas Antar Wilayah	Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
			Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	
			Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	

			Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis	Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi	Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
			Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan	Lemahnya Implementasi e-Government	
			Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi	
				Penanganan Konflik Sosial dan Bencana		

Sumber data Laporan Induk KLHS RPJMD Kab Mojokerto 2025-2029

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan menyajikan latar belakang, gambaran umum, isu strategis serta sistematika penulisan laporan kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatan. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

Bab IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Penjenjangan Strategis

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta menjamin ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada tahun berjalan disusun dengan mengacu pada dua periode dokumen perencanaan, yaitu Renstra Tahun 2021–2025 dan Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi ini terjadi sebagai bagian dari masa transisi perencanaan, di mana sebagian program dan kegiatan masih berlandaskan pada prioritas periode sebelumnya, sementara arah kebijakan dan target kinerja periode baru mulai diimplementasikan secara bertahap.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025 , Pemerintahan Kabupaten Mojokerto di Tahun 2021-2015 memiliki 1 Visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
 2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
 4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.
- Kecamatan Kutorejo sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam misi Bupati Mojokerto yang ke 3 (tiga) yaitu :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS, AKUNTABEL , BERSIH , TRANSPARAN”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.A Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Nilai IKM Kecamatan	93,75
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal			IKM Kecamatan	93,75
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,85
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%
		-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
		-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	94%
		-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang/Bulan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%
		-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket
		-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
		-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket
		-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
		-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen
		-	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket
		-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%
		-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan

			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 unit
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21 Unit
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1260 Pelayanan
			- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 laporan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	18 Laporan
			- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen
			- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen
			- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen
			- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 serta menjawab berbagai tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi di wilayah Kecamatan Kutorejo, diperlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan lebih lanjut dalam

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutorejo sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Perencanaan pembangunan Kecamatan Kutorejo mengacu pada visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Visi ini menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Kutorejo.

Dalam rangka tugas utama *“membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”*, Kecamatan Kutorejo mengampu **Misi ke 1 Kabupaten Mojokerto** sebagaimana tertuang dalam *Catur Abhipraya Mubarak*, yaitu:

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik”

Misi ini selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang berperan langsung dalam pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.

Sebagai penjabaran dari misi tersebut, Kecamatan Kutorejo menetapkan tujuan perangkat daerah dalam Renstra Kecamatan Kutorejo Tahun 2025–2029, yaitu:

“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.”

Tujuan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Kutorejo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran Renstra Kecamatan Kutorejo Tahun 2025–2029, yaitu:

“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.”

Sasaran ini diukur dengan **Indikator Kinerja Sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**, sebagai ukuran keberhasilan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.B Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, transparan, akuntabel dan responsif	Nilai SAKIP	82,85
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82,85
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	100%
	Persentase Realisasi Anggaran PD	94%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang/Bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen
- Penyediaan Bahan/Material	jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	3 Paket

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,75
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 laporan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	18 Laporan
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen

-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen
-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen

Melalui keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut, Kecamatan Kutorejo diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Mojokerto serta mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan IKU Kecamatan Kutorejo mengacu pada dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra Kecamatan Kutorejo, serta diselaraskan dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Setiap indikator kinerja utama dirumuskan secara terukur dan dilengkapi dengan formulasi penghitungan, definisi indikator, serta sumber data yang jelas guna menjamin konsistensi pengukuran dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Kutorejo memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.2.A Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	Laporan Hasil Sukma E Ket = Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Sukma E	Kecamatan

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terselenggaranya Pelayanan PATEN Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Laporan Hasil Pelayanan	Kecamatan
2.	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan	Persentase Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%	Dokumen Hasil Koordinasi	Kecamatan
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100S	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Kecamatan	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan	Kecamatan
		Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
4.	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah pada Kecamatan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Kecamatan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Kecamatan	Laporan Inovasi Kecamatan	Kecamatan

Tabel II.2.B Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan publik yang optimal	IKM Kecamatan	Laporan Hasil Sukma E Ket = Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Sukma E	Kecamatan
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100S	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan Yang Diselenggarakan Sesuai Standar	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Laporan Hasil pelayanan	Kecamatan
4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%	Dokumen Hasil Koordinasi	Kecamatan

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh Bupati Mojokerto pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 yang dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini dengan indicator sebagai berikut:

Tabel II.3.A Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	93,75	92,49	98,65%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,85	83,41	100,67%
		1.1	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	92,48	93,38%
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN	84,8 (Tinggi)	84,67 (Tinggi)	99,84%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	1 Inovasi	33,33%	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.566.932.000,00	APBD 2025
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 10.000.000,00	APBD 2025
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 190.000.000,00	APBD 2025

Tabel II.3.c. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,75	92,49	98,65%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,85	83,41	100,67%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan Yang Diselenggarakan Sesuai Standar	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, maka ditetapkan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel II.3.d Anggaran Per Program Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.549.404.900,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 9.000.000,00

3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	421.995.100,00
----	---	----	----------------

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai selama periode pelaporan.

Pada Tahun 2025 terdapat dua Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021–2025, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun sebagai penyesuaian setelah ditetapkannya dokumen perencanaan periode 2025–2029. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian indikator dan target kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun berjalan. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel III.1.A. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	% CAPAIAN
				I	II	III	IV	2025	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	93,75	-	85,42	-	92,49	92,49	98,65%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	% CAPAIAN
				I	II	III	IV	
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	19%	23%	21%	37%	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,85	-	-	83,41	-	100,67%

	Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	16,53%	41,12%	61,75%	92,48	93,38%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	84,8 (Tinggi)	-	-	-	84,67 (Tinggi)	99,84%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	1 Inovasi	-	-	-	33,33%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 4 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Selanjutnya Capaian perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1.B. Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	% CAPAIAN
				I	II	III	IV	
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,75	-	-	-	92,49	98,65%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,85	-	-	-	83,41	100,67%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan Yang Diselenggarakan Sesuai Standar	100%	-	-	-	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	% CAPAIAN
				I	II	III	IV	
							2.202 Pelayanan	
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase HASil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	100%	-	-	-	100% 18 Dokumen	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

3.2. Analisis Kinerja

Analisis Kinerja menyajikan penelaahan atas tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kutorejo selama Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, baik yang tercapai maupun yang belum mencapai target, guna memberikan gambaran objektif atas kinerja yang telah dilaksanakan.

Analisis kinerja disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, termasuk efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam evaluasi kinerja, pengambilan keputusan manajerial, serta perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah disajikan pada sub bagian Pengukuran Kinerja, berikut adalah analisis capaian kinerja pada Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 :

- ❖ Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal. Indikator Kinerjanya adalah IKM Kecamatan dengan target kinerja 93,75 terealisasi 92,49 sehingga Capaian Kinerjanya mengalami penurunan yaitu 98,65%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Nilai IKM Kecamatan didapat dari Hasil Laporan Aplikasi Sukma e.

Nilai Indeks dikategorikan berdasarkan hasil Nilai yang diperoleh :

- Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99
- Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60
- Kategori Baik : 76,61 – 88,30
- Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00

Target IKM Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 adalah 93,75.

Realisasi Tahun 2025 :

- Semester I : 85,42
- Semester II : 92,49

Realisasi IKM Kecamatan Kutorejo pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang mengalami penurunan dari target yang telah ditentukan. Tren peningkatan/penurunan nilai IKM setiap triwulan/semester mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan, maupun sikap petugas. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan telah berjalan kurang efektif sehingga efeknya berdampak langsung kepada masyarakat.

- ❖ Kinerja Lainnya Terselenggaranyapelayanan PATEN sesuai standar pelayanan. Indikator Kinerjanya adalah Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target kinerja nilai 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepatuhan Kecamatan Kutorejo dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Indikator ini mencerminkan kualitas dan konsistensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Pelayanan dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan}}{\text{Jumlah Pelayanan Yang Terlayani}} \times 100\%$$

Dengan Realisasi per triwulan sebagai berikut :

Triwulan I : 100% (484 pelayanan)

Triwulan II : 100% (618 pelayanan)

Triwulan III : 100% (462 pelayanan)

Triwulan IV : 100% (638 pelayanan)

Capaian Kinerjanya : 100%

Seluruh pelayanan PATEN pada Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Konsistensi capaian 100% pada setiap triwulan menunjukkan kepatuhan aparatur terhadap standar operasional prosedur serta meningkatnya keandalan sistem pelayanan kecamatan.

❖ **Kinerja Lainnya Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan.**

Indikator Kinerjanya adalah Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja nilai 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas Kecamatan Kutorejo dalam menindaklanjuti hasil koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini mencerminkan komitmen Kecamatan dalam mewujudkan hasil koordinasi ke dalam tindakan nyata guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sumber data diperoleh dari Dokumen hasil Koordinasi Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , Kasi Trantib dan Linmas serta kasi Kemasyarakatan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi}} \times 100\%$$

Dengan realisasi target triwulan sebagai berikut :

Triwulan I : 19% (3 fasilitasi)

Triwulan II : 23% (5 fasilitasi)

Triwulan III : 21% (4 fasilitasi)

Triwulan IV : 37% (6 fasilitasi)

Capaian Kinerjanya adalah 100% (18 fasilitasi)

Realisasi indikator ini menunjukkan bahwa seluruh hasil fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada akhir tahun telah ditindaklanjuti secara optimal. Rendahnya persentase pada triwulan awal disebabkan oleh proses tindak lanjut yang memerlukan waktu lintas sektor. Penyelesaian tindak lanjut pada triwulan IV memastikan target tahunan dapat tercapai sepenuhnya.

- ❖ Kinerja Lainnya Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel ada 3 indikator yaitu :

1. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Target Nilai SAKIP Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 yaitu 82,85 dengan realisasi 83,41 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,67%.

Dengan Kategori Penilaian :

- Kategori Sangat Kurang : 0 – 30
- Kategori Kurang : 30 – 50
- Kategori Cukup : 50 – 60
- Kategori Baik : 60 -70
- Kategori Sangat Baik : 70 – 80
- Kategori Memuaskan : 80 -90
- Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah melampaui target yang ditetapkan dengan predikat “A”. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Persentase realisasi anggaran adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan total anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran.

Sumber data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Kutorejo dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu anggaran}} \times 100\%$$

Target Kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 adalah 94%

Realisasi:

Triwulan I	: 16,53%
Triwulan II	: 41,12%
Triwulan III	: 61,75%
Triwulan IV	: 92,48%

Sehingga Capaian Kinerjanya adalah 92,48%

Realisasi anggaran menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap triwulan. Meskipun realisasi akhir sedikit di bawah target, capaian ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang relatif efektif dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.

3. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran tingkat profesionalisme ASN yang meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Sumber Data penghitungan IP ASN didapat dari Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM Kabupaten Mojokerto.

Dengan Kategori Penilaian IP ASN :

- Kategori Sangat Rendah : ≤ 60
- Kategori Rendah : 61 – 70
- Kategori Sedang : 71 – 80
- Kategori Tinggi : 81 – 90
- Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100

Target Kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 adalah 84,80 (Tinggi)

Realisasi Kinerja IP ASN Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 adalah : 84,76 (Tinggi)

Sehingga Capaian Kinerjanya adalah : 101,2%

Capaian Indeks Profesionalitas ASN berada pada kategori tinggi meskipun kurang dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas ASN dalam pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja aparatur.

- ❖ Kinerja Lainnya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan dengan Indikator Kinerjanya adalah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Sumber data didapatkan dari Laporan Inovasi Kecamatan Kutorejo Tahun 2025.

Pada awal Tahun 2025, Kecamatan Kutorejo menetapkan sebanyak 3 (tiga) inovasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yaitu :

1. Inovasi “DONFILA MASREJO” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/24/KEP/416-307/2023 tahun 2023 tentang Inovasi Layanan Kependudukan.
2. Inovasi “SI JOLIS” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/ 6 /KEP/416-307/2024 tahun 2024 tentang Inovasi Aksi Kutorejo peduli Stunting, dimana setiap 2 bulan Kecamatan Kutorejo dan Tim Penanganan Stunting Kecamatan Kutorejo melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan anak-anak yang mengalami kondisi stunting.
3. Inovasi “LAJU MEREKAH” sesuai dengan Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/16/KEP/416-307/2023 Tahun 2023 yaitu tentang “ Pelayanan Jum’at Membawa Berkah” Kecamatan Kutorejo Tahun 2023.

Namun demikian, seiring dengan dinamika pelaksanaan program dan evaluasi keberlanjutan inovasi, dilakukan penelaahan terhadap relevansi, efektivitas, serta kebermanfaatan inovasi tersebut dalam mendukung pencapaian kinerja kecamatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 3 (tiga) inovasi pada Kecamatan Kutorejo dinilai tidak lagi relevan dan tidak dapat diimplementasikan secara

berkelanjutan, sehingga tidak layak untuk dilaporkan dalam Laporan Kinerja Kecamatan Kutorejo. Dari hasil evaluasi 3 Inovasi yang tidak layak maka Kecamatan Kutorejo mengganti dengan inovasi baru yang relevan, efektif dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan pada Tahun 2025 yaitu “DEWA ANREJO” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/007.1/416-307/2025 tahun 2025. Inovasi ini merupakan terobosan pelayanan publik di Kecamatan Kutorejo dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pelayanan dispensasi kehendak nikah bagi pasangan yang mengajukan pernikahan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan tentang Inovasi. Sehingga Target kinerja 3 Inovasi terelaisasi 1 Inovasi dengan capaian kinerja 33,33% Penyesuaian pelaporan inovasi tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Kecamatan Kutorejo terhadap prinsip akuntabilitas dan kualitas pelaporan kinerja, dengan mengedepankan inovasi yang benar-benar memberikan nilai tambah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada Sasaran Strategis yang tertuang di Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025) Capaian Kinerja yang dapat disajikan adalah Capaian Kinerja yang tercapai pada triwulan IV dengan analisis sebagai berikut :

- ❖ Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan, indikator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dengan target kinerja 93,75 terealisasi 92,49 sehingga Capaian Kinerjanya mengalami penurunan yaitu 98,65%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Nilai IKM Kecamatan didapat dari Hasil Laporan Aplikasi Sukma e.

Nilai Indeks dikategorikan berdasarkan hasil Nilai yang diperoleh :

- Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99
- Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60
- Kategori Baik : 76,61 – 88,30

- Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00

Realisasi IKM Tahun 2025 terdiri dari :

- Semester I : 85,42
- Semester II : 92,49

Realisasi IKM Kecamatan Kutorejo pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang mengalami penurunan dari target yang telah ditentukan. Tren peningkatan/penurunan nilai IKM setiap triwulan/semester mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan, maupun sikap petugas. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan telah berjalan kurang efektif sehingga efeknya berdampak langsung kepada masyarakat.

- ❖ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Target Nilai SAKIP Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 yaitu 82,85 dengan realisasi 83,41 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,67%.

Dengan Kategori Penilaian :

- Kategori Sangat Kurang : 0 – 30
- Kategori Kurang : 30 – 50
- Kategori Cukup : 50 – 60
- Kategori Baik : 60 -70
- Kategori Sangat Baik : 70 – 80
- Kategori Memuaskan : 80 -90
- Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah melampaui target yang ditetapkan dengan predikat “A”. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

- ❖ Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)” dengan Indikator Kinerja Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar.

Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepatuhan Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Indikator ini mencerminkan kualitas dan konsistensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Pelayanan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan}}{\text{Jumlah Pelayanan Yang Terlayani}} \times 100\%$$

Target Kinerja Tahun 2025 adalah 100% (1260 Pelayanan

Realisasi Triwulan IV : 100% (2202 pelayanan)

Capaian Kinerjanya : 100%

Seluruh pelayanan PATEN pada Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Konsistensi capaian 100% pada setiap triwulan menunjukkan kepatuhan aparatur terhadap standar operasional prosedur serta meningkatnya keandalan sistem pelayanan kecamatan.

- ❖ Pada Sasaran Strategis “ Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah daerah” dengan indikator kinerja adalah Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti.

Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas Kecamatan Kutorejo dalam menindaklanjuti hasil koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini mencerminkan komitmen Kecamatan dalam mewujudkan hasil koordinasi ke dalam tindakan nyata guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sumber data diperoleh dari Dokumen hasil Koordinasi Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , Kasi Trantib dan Linmas serta kasi Kemasyarakatan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi}} \times 100\%$$

Dengan realisasi target triwulan sebagai berikut :

Triwulan IV : 100% (18 fasilitasi)

Capaian Kinerjanya adalah 100% (18 fasilitasi)

Realisasi indikator ini menunjukkan bahwa seluruh hasil fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada akhir tahun telah ditindaklanjuti secara optimal. Rendahnya persentase pada triwulan awal disebabkan oleh proses tindak lanjut yang memerlukan waktu lintas sektor. Penyelesaian tindak lanjut pada triwulan IV memastikan target tahunan dapat tercapai sepenuhnya.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan untuk menilai perkembangan dan konsistensi kinerja Kecamatan Tahun 2025. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan dua Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Periode 2021–2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan Periode 2025–2029, sebagai dampak dari transisi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perbandingan kinerja dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan keselarasan indikator dan kesinambungan pencapaian kinerja antar periode perencanaan. Berikut adalah Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya :

Tabel III.2.a Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			KET
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	n/a	n/a	n/a	81	82,99	102,46%	85	90,35	106,29%	90,36	93,66	103,65%	93,75	92,49	98,65	

KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			KET	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	100%	81%	99,04%	122,27%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	81%	98,53%	121,64%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	73	81,95	112,26 %	79,86	81,99	102,67%	81	80,86	99,82%	82	82,75	100,91%	82,85	83,41	100,67%		
	3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	81,00%	98,09%	113,38%	95%	97,85%	103%	97,86%	93,35%	95,39%	94%	92,48%	93,38%		
	3.3 Indeks Profesionalitas ASN	n/a	n/a	n/a	72	44,47	61,18	77	77,99	101%	84	84,76	100,90%	84,8	84,67	99,84%		
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	n/a	n/a	1 Inovasi	2 Inovasi	200%	3 Inovasi	2 Inovasi	67%	3 Inovasi	3 Inovasi	100%	3 Inovasi	1 Inovasi	33,33%		

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			KET
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	99,04%	122,27 %	81%	99,04%	122,27 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	81%	98,53%	121,64 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan	73	81,95	112,26 %	79,86	81,99	102,67 %	81	80,86	99,82%	82	82,75	100,91 %	82,85	83,41	100,67 %	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	n/a	n/a	1 Inovasi	2 Inovasi	200%	3 Inovasi	2 Inovasi	67%	3 Inovasi	3 Inovasi	100%	3 Inovasi	1 Inovasi	33,33%	

Tabel III.2.b Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	90,36	93.66	103.65%	93,75	92,49	98,65
2	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,75	100,91%	82,85	83,41	100,67%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2024			2025			2026			2027			2028			2029			KE T
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	90,36	93.66	103.65%	93,75	92,49	98,65	93,77	-	-	93,80	-	-	93,81	-	-	93,83	-	-	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,75	100,91%	82,85	83,41	100,67%	82	-	-	82,26	-	-	82,48	-	-	82,89	-	-	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dan target akhir Rencana Strategis (Renstra) disajikan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kutorejo secara kumulatif. Analisis ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana realisasi kinerja yang telah dicapai mampu mendukung pencapaian target akhir Renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta merumuskan langkah perbaikan pada periode perencanaan berikutnya. Berikut adalah tabel yang membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir renstra yaitu :

Tabel III.2.c Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	n/a	82,99	90,35	93,66	92,49	85	108,81%

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	99,04 %	100%	100%	100%	85%	117,65%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	n/a	98,53 %	100%	100%	100%	85%	117,65%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	81,95	81,99	80,86	82,75	83,41	82	101,72%
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	n/a	98,09 %	97,85%	93,35 %	93,48%	85%	109,98%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	n/a	44,47	77,99	84,76	84,67	73	115,99%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	2 Inovasi	2 Inovasi	3 Inovasi	1 Inovasi	-	-

1. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “Tewujudnya pelayanan publik yang optimal” dengan indikator IKM Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 108,81%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 85. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

- Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan Kutorejo secara berkelanjutan melakukan perbaikan standar pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan, serta kepastian waktu

layanan, sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

- **Optimalisasi peran dan kapasitas aparatur pelayanan**
Peningkatan kompetensi aparatur dilakukan melalui pembinaan, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan disiplin dan etika pelayanan, sehingga aparatur mampu memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional.
- **Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan secara efektif**
Dukungan sarana prasarana pelayanan, termasuk ruang layanan yang representatif dan fasilitas pendukung, dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.
- **Penerapan mekanisme pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat**
Kecamatan Kutorejo secara aktif menindaklanjuti pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan, sehingga pelayanan publik semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
- **Komitmen pimpinan dalam penguatan tata kelola pelayanan public**
Adanya komitmen dan pengawasan dari pimpinan kecamatan mendorong konsistensi pelaksanaan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, serta memastikan setiap unit pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- **Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara objektif dan berkelanjutan**
Pelaksanaan survei IKM secara rutin dan sesuai ketentuan memberikan gambaran riil terhadap persepsi masyarakat, yang kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan inovasi pelayanan.

2. **Capaian Indikator pada Kinerja Lainnya “ Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan”** dengan indikator Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan pada tahun 2025 sebesar 117,65 %. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100 % dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 85%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- **Penerapan dan konsistensi standar pelayanan**
Kecamatan Kutorejo telah menerapkan standar pelayanan secara konsisten, meliputi pemenuhan persyaratan, kejelasan alur pelayanan, serta kepastian waktu dan biaya layanan, sehingga seluruh pelayanan dapat terlaksana sesuai ketentuan.
- **Penguatan koordinasi dan pembagian tugas aparatur pelayanan**
Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar aparatur pelayanan mendorong kelancaran proses pelayanan serta meminimalkan kesalahan administrasi dan keterlambatan layanan.
- **Peningkatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur Pelayanan**
Aparatur pelayanan dibekali dengan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta didorong untuk menjaga disiplin dan etika pelayanan, sehingga pelayanan dapat diberikan secara profesional dan akuntabel.
- **Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan**

Ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan secara optimal, termasuk loket pelayanan, sistem administrasi, dan fasilitas pendukung lainnya, turut mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.

- **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan secara berkala**
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penyelenggaraan pelayanan PATEN memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan serta memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
- **Komitmen pimpinan dalam menjaga mutu pelayanan**
Dukungan dan pengawasan pimpinan kecamatan berperan penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan pelayanan PATEN serta mendorong aparatur untuk menjaga kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. **Capaian Indikator pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan ”** dengan indikator Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 117,65%. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100 % dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 85%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- **Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor**
Kecamatan secara aktif melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, serta unsur terkait lainnya guna menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- **Kejelasan mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi**
Setiap hasil rapat dan forum koordinasi didokumentasikan secara sistematis serta ditetapkan langkah tindak lanjut yang jelas, termasuk penanggung jawab dan waktu pelaksanaan, sehingga hasil koordinasi dapat segera diimplementasikan.
- **Penguatan peran fasilitasi kecamatan**
Kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan di wilayahnya, baik melalui pendampingan, mediasi, maupun sinkronisasi antar pemangku kepentingan.
- **Komitmen aparatur dalam pelaksanaan hasil koordinasi**
Aparatur kecamatan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti hasil koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran
- **Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil koordinasi**
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil koordinasi memastikan bahwa seluruh kesepakatan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar ditindaklanjuti sesuai rencana.
- **Dukungan pimpinan dalam penguatan koordinasi pemerintahan**
Arahan, pengawasan, dan dukungan pimpinan kecamatan menjadi faktor penting dalam mendorong konsistensi pelaksanaan koordinasi dan percepatan tindak lanjut hasil koordinasi pemerintahan.

4. Capaian Indikator pada Kinerja Lainnya “Meningkatnya tata kelola birokrasi Pemerintahan yang Efektif , Efisien dan Akuntabel ” dengan indikator :

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 101,72. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 83,41 dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 82. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang dialami, yaitu:
 - Belum optimalnya kualitas perencanaan dan indikator kinerja
Perumusan indikator kinerja pada beberapa sasaran belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART dan belum seluruhnya berorientasi pada outcome, yang mempengaruhi penilaian atas kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja.
 - Pengukuran kinerja belum dilakukan secara menyeluruh
Pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah belum ditampilkan hingga level individu pegawai.
 - Pelaporan Kinerja belum menyajikan analisis secara lengkap
laporan kinerja belum menyajikan analisis terhadap perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level Pemerintah Daerah, baik pada tingkat sasaran strategis maupun kinerja lainnya serta belum menyajikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.
 - Keterbatasan dalam pemanfaatan hasil pengukuran kinerja
Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
- Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 109,98%. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 93,48% dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 85%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu ::
 - Perencanaan anggaran yang lebih realistis dan terukur
Penyusunan perencanaan anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan riil kegiatan dan kapasitas pelaksanaan, sehingga anggaran dapat direalisasikan secara optimal.
 - Penguatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran
Kecamatan secara rutin melakukan pemantauan terhadap progres realisasi anggaran, baik secara fisik maupun keuangan, guna mengantisipasi potensi keterlambatan dan hambatan pelaksanaan kegiatan.
 - Koordinasi yang efektif antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan
Terjalinnnya koordinasi yang baik antara pejabat pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan mendorong percepatan proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan.
 - Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan

Aparatur pengelola keuangan dibekali pemahaman yang memadai terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga proses penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu.

- Penyesuaian dan percepatan pelaksanaan kegiatan strategis
Kecamatan melakukan penyesuaian jadwal dan prioritas kegiatan secara fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan, sehingga anggaran dapat terserap secara optimal sesuai dengan ketentuan.
 - Komitmen pimpinan dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran
Dukungan dan arahan pimpinan berperan penting dalam mendorong percepatan realisasi anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 sebesar 115,99%. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 84,67 dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 73. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu :
- Peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan
Kecamatan mendorong ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan tugas dan jabatan, sehingga meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja aparatur.
 - Penguatan penerapan disiplin dan etika ASN
Penerapan aturan kedisiplinan dan kode etik ASN dilakukan secara konsisten, sehingga mendorong terbentuknya sikap kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik
 - Optimalisasi penilaian kinerja ASN
Pelaksanaan penilaian kinerja ASN dilakukan secara objektif dan terukur melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang mendorong ASN untuk bekerja lebih fokus pada pencapaian target dan hasil kerja.
 - Penataan penempatan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi
Penugasan dan penempatan ASN dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi, sehingga mendukung peningkatan efektivitas dan profesionalitas kerja.
 - Peningkatan motivasi dan budaya kerja aparatur
Pimpinan secara aktif memberikan pembinaan, arahan, dan keteladanan guna menumbuhkan budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja.
5. Capaian Indikator pada Kinerja Lainnya “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan indikator Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi, Tersosialisasi, dan Berkelanjutan pada Tahun 2025 tidak dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja. Hal tersebut disebabkan indikator dimaksud

tidak tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kutorejo Tahun 2021–2025, sehingga tidak tersedia target kinerja sebagai dasar pengukuran dan perbandingan capaian.

Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi Kecamatan Kutorejo untuk memperkuat perencanaan kinerja ke depan, khususnya dengan memasukkan aspek inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari indikator kinerja strategis, agar pelaksanaan dan pengukuran inovasi dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel III.2.d Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,49	-	-	-	-	93,85	98,55%
2	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83,41	-	-	-	-	83	100,49%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%

1. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan” dengan indikator IKM Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 98,55 %. Angka capaian tersebut didapatkan dari target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029 sebesar 93,85%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Kecamatan Kutorejo secara berkelanjutan melakukan perbaikan standar pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan, serta kepastian waktu layanan, sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
- Optimalisasi peran dan kapasitas aparatur pelayanan
Peningkatan kompetensi aparatur dilakukan melalui pembinaan, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan disiplin dan etika pelayanan, sehingga aparatur mampu memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional.

- Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan secara efektif
Dukungan sarana prasarana pelayanan, termasuk ruang layanan yang representatif dan fasilitas pendukung, dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.
 - Penerapan mekanisme pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat Kecamatan Kutorejo secara aktif menindaklanjuti pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan, sehingga pelayanan publik semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - Komitmen pimpinan dalam penguatan tata kelola pelayanan publik
Adanya komitmen dan pengawasan dari pimpinan kecamatan mendorong konsistensi pelaksanaan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, serta memastikan setiap unit pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
 - Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara objektif dan berkelanjutan
Pelaksanaan survei IKM secara rutin dan sesuai ketentuan memberikan gambaran riil terhadap persepsi masyarakat, yang kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan inovasi pelayanan.
2. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 100,49%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029 sebesar 83,41. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang dialami, yaitu:
- Belum optimalnya kualitas perencanaan dan indikator kinerja
Perumusan indikator kinerja pada beberapa sasaran belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART dan belum seluruhnya berorientasi pada outcome, yang mempengaruhi penilaian atas kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja.
 - Pengukuran kinerja belum dilakukan secara menyeluruh
Pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah belum ditampilkan hingga level individu pegawai.
 - Pelaporan Kinerja belum menyajikan analisis secara lengkap
Laporan kinerja belum menyajikan analisis terhadap perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level Pemerintah Daerah, baik pada tingkat sasaran strategis maupun kinerja lainnya serta belum menyajikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.
 - Keterbatasan dalam pemanfaatan hasil pengukuran kinerja
Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
3. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “ Meningkatkan Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)” dengan indikator Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar pada tahun 2025 sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan

dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029 sebesar 100%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

➤ Penerapan dan konsistensi standar pelayanan

Kecamatan Kutorejo telah menerapkan standar pelayanan secara konsisten, meliputi pemenuhan persyaratan, kejelasan alur pelayanan, serta kepastian waktu dan biaya layanan, sehingga seluruh pelayanan dapat terlaksana sesuai ketentuan.

➤ Penguatan koordinasi dan pembagian tugas aparatur pelayanan

Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar aparatur pelayanan mendorong kelancaran proses pelayanan serta meminimalkan kesalahan administrasi dan keterlambatan layanan.

➤ Peningkatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur

Aparatur pelayanan dibekali dengan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta didorong untuk menjaga disiplin dan etika pelayanan, sehingga pelayanan dapat diberikan secara profesional dan akuntabel.

➤ Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan secara optimal, termasuk loket pelayanan, sistem administrasi, dan fasilitas pendukung lainnya, turut mempercepat dan mempermudah proses pelayanan .

➤ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan secara berkala

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penyelenggaraan pelayanan memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan serta memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

➤ Komitmen pimpinan dalam menjaga mutu pelayanan

Dukungan dan pengawasan pimpinan kecamatan berperan penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan pelayanan serta mendorong aparatur untuk menjaga kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat

4. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “ Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah” dengan indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029 sebesar 100%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

➤ Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor

Kecamatan secara aktif melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, serta unsur terkait lainnya guna menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan.

➤ Kejelasan mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi

Setiap hasil rapat dan forum koordinasi didokumentasikan secara sistematis serta ditetapkan langkah tindak lanjut yang jelas, termasuk penanggung jawab dan waktu pelaksanaan, sehingga hasil koordinasi dapat segera diimplementasikan.

➤ Penguatan peran fasilitasi kecamatan

Kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan di wilayahnya, baik melalui pendampingan, mediasi, maupun sinkronisasi antar pemangku kepentingan.

➤ Komitmen aparatur dalam pelaksanaan hasil koordinasi

Aparatur kecamatan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti hasil koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

➤ Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil koordinasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil koordinasi memastikan bahwa seluruh kesepakatan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar ditindaklanjuti sesuai rencana.

➤ Dukungan pimpinan dalam penguatan koordinasi pemerintahan

Arahan, pengawasan, dan dukungan pimpinan kecamatan menjadi faktor penting dalam mendorong konsistensi pelaksanaan koordinasi dan percepatan tindak lanjut hasil koordinasi pemerintahan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja disusun untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Kecamatan Kutorejo pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Analisis ini dilakukan melalui penelaahan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, efektivitas pelaksanaan anggaran, kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sarana prasarana dan kebijakan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan alternatif solusi dan langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan keberlanjutan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Berikut adalah Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis :

Tabel III. 2. e. Penyebab keberhasilan atau kegagalan yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis Tahun 2025

N O	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		% CAPAI AN	TINGKAT KEBERHASILAN	FAKTOR KEBERHASILAN	FAKTOR KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	100	%	100	%	100	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya standar pelayanan publik yang jelas sehingga memudahkan pengukuran kinerja. - Kualitas pelayanan meningkat dengan adanya digitalisasi dan SOP yang diterapkan. - Dukungan SDM dan koordinasi antar unit yang efektif. 	-	-
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)	1260	Pelayanan	2202	Pelayanan	174,76	Baik Sekali	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme perizinan dan nonperizinan berjalan sesuai standar. - Sistem administrasi (manual & digital) cukup efektif. 	-	-
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)	18	Laporan	18	Laporan	100	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan nonperizinan. - Aparatur responsif dan cepat dalam memberikan layanan. - Dukungan sarana prasarana yang memadai. 	-	-
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)	100	%	100	%	100	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya koordinasi yang baik antara Pengguna Anggaran , PPTK serta Kasi/Kasubag serta Staf dalam pelaksanaan kegiatan. - Penyusunan Dokumen Perencanaan yang baik serta komitmen Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Time Line kegiatan yang telah ditetapkan. - Adanya komitmen Bersama dalam pencapaian target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh seluruh Pegawai Kecamatan Kutorejo. - Monitoring dan Evaluasi berkala dalam memantau capaian kinerja. 	-	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilitasi)	18	Fasilitasi	18	Fasilitasi	100	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - perencanaan yang tepat, - kecukupan anggaran, - kapasitas aparatur & pendamping, - koordinasi antar stakeholder, - kepatuhan regulasi, - partisipasi pemerintah desa & masyarakat, - keberlanjutan monitoring serta evaluasi. 	-	-
2	[SUB KEGIATAN]7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	3	Dokumen	3	Dokumen	100	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - perencanaan yang tepat, - kecukupan anggaran, - kapasitas aparatur & pendamping, - koordinasi antar stakeholder, - kepatuhan regulasi, - partisipasi pemerintah desa & masyarakat, - keberlanjutan monitoring serta evaluasi. 	-	-

3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)	3	Dokumen	3	Dokumen	100	Baik	- perencanaan yang tepat, - kecukupan anggaran, - kapasitas aparatur & pendamping, - koordinasi antar stakeholder, - kepatuhan regulasi, - partisipasi pemerintah desa & masyarakat, - keberlanjutan monitoring serta evaluasi.	-	-
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)	4	Dokumen	4	Dokumen	100	Baik	- perencanaan yang tepat, - kecukupan anggaran, - kapasitas aparatur & pendamping, - koordinasi antar stakeholder, - kepatuhan regulasi, - partisipasi pemerintah desa & masyarakat, - keberlanjutan monitoring serta evaluasi.	-	-
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)	8	Dokumen	8	Dokumen	100	Baik	- perencanaan yang tepat, - kecukupan anggaran, - kapasitas aparatur & pendamping, - koordinasi antar stakeholder, - kepatuhan regulasi, - partisipasi pemerintah desa & masyarakat, - keberlanjutan monitoring serta evaluasi.	-	-
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	82,85	Nilai	83,41	Nilai	100,74	Baik Sekali	- Perencanaan yang baik - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal	-	-
C	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)	85	Nilai	100	Nilai	117,65	Baik Sekali	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta movev secara berkala.	-	-
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	Dokumen	6	Dokumen	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta movev secara berkala.	-	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	23	Laporan	23	Laporan	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta movev secara berkala.	1. Tindak lanjut atas temuan Inspektorat berupa pengembalian anggaran ke Kas Daerah berdampak pada realisasi Anggaran	-
D	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	90	%	93,48	%	96,27	Baik	Capaian Kinerja memamng tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan tetapi dengan prosentase kinerja 98,14 % sudah masuk dalam kategori Baik	- Tindak lanjut atas temuan Inspektorat berupa pengembalian anggaran ke Kas Daerah berdampak pada realisasi Anggaran , - Terdapat kegiatan Wawasan Kebangsaan dimana perencanaan untuk Narasumber tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan . - Adanya kekosongan jabatan struktural sebanyak 2 orang yang mempengaruhi realisasi anggaran gaji	- Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Anggaran - Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan - Percepatan Pengisian Jabatan Struktural - Penguatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

										- Adanya efisiensi belanja dari pengadaan barang dan jasa	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	18	Orang/Bulan	18	Orang/Bulan	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	Adanya pegawai yang pensiun sehingga pengaruh di penyerapan gaji dan tunjangan pegawai	-
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	85	%	100	%	117,65	Baik Sekali	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1	Paket	1	Paket	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	2	Paket	2	Paket	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	12	Paket	12	Paket	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	--
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	2	Paket	2	Paket	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
14	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	3	Paket	3	Paket	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12	Laporan	12	Laporan	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	85	%	100	%	117,65	Baik Sekali	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	24	Laporan	24	Laporan	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	24	Laporan	24	Laporan	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-

G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	85	%	100	%	117,65	Baik Sekali	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	1	Unit	1	Unit	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	3	Unit	3	Unit	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	21	Unit	21	Unit	100	Baik	Adanya Dukungan Anggaran , Perencanaan ,Penatausahaan yang baik serta monev secara berkala.	-	-

Keterangan :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Kutorejo disusun untuk menilai tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan Kecamatan Kutorejo. Sumber daya yang dianalisis meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan.

Analisis ini tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian kinerja secara kuantitatif, tetapi juga pada kesesuaian antara input yang digunakan dengan output dan outcome yang dihasilkan. Dengan demikian, analisis efisiensi diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas alokasi sumber daya, tingkat pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta potensi perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kutorejo secara berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel III.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029) , progres capaian Kecamatan Kutorejo telah mencapai 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Kecamatan Kutorejo. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Kecamatan Kutorejo juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung refocusing prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa :

- Peningkatan nilai IP ASN pegawai Kecamatan Kutorejo melakukan pelatihan daring dan peningkatan kompetensi tanpa menambah beban anggaran.
- Melakukan belanja yang efektif dan fokus pada hasil yang terukur dengan menggunakan e purchasing sehingga menghemat biaya operasional perjalanan dinas.
- Memanfaatkan Teknologi Informasi, yang mempercepat pelayanan, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan transparansi.
- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas oleh Pemkab Mojokerto sebesar 50 % dari pagu anggaran perjalanan dinas
- Optimalisasi penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja dengan menggunakan anggaran secara tepat sasaran dan memberikan hasil nyata.

Dari upaya tersebut, telah terjadi efisiensi sebesar Rp. 26.600.000,00. Anggaran hasil dari efisiensi tersebut, dialihkan untuk belanja publik sebagai upaya mengoptimalkan capaian target yang menjadi prioritas kabupaten. Program yang mendukung pencapaian tersebut, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 12.500.000,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.1.000.000,00
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 13.100.000,00

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Kecamatan Kutorejo akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan meskipun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah melampaui target, Kecamatan perlu :
 - Melakukan evaluasi rutin terhadap hasil survei IKM,
 - Menindaklanjuti saran dan masukan masyarakat,
 - Memperkuat budaya pelayanan prima pada aparatur.Rencana aksi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan mencegah penurunan kualitas pelayanan di periode berikutnya.
2. Penguatan standar dan kapasitas pelayanan
Dengan tercapainya 100% pelayanan sesuai standar, rencana aksi diarahkan pada :
 - Pemutakhiran SOP pelayanan,
 - Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan,
 - Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi pelayanan.Langkah ini dilakukan agar volume pelayanan yang meningkat tetap diimbangi dengan kualitas dan ketepatan layanan.
3. Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi pemerintahan adalah Keberhasilan tindak lanjut hasil koordinasi yang perlu diperkuat melalui :
 - Penjadwalan koordinasi yang lebih terencana,
 - Penetapan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil koordinasi,
 - Dokumentasi hasil koordinasi yang lebih sistematis.Hal ini bertujuan agar koordinasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak nyata pada penyelesaian permasalahan pemerintahan.
4. Penguatan implementasi SAKIP secara substantive Walaupun nilai SAKIP telah mencapai kategori baik, rencana aksi difokuskan pada :
 - Peningkatan kualitas perencanaan berbasis outcome,
 - Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan,
 - Penguatan revidi internal terhadap dokumen kinerja.Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas SAKIP, tidak hanya dari sisi nilai tetapi juga implementasinya.
5. Pengendalian dan perencanaan anggaran yang lebih presisi Dengan realisasi anggaran yang terkendali, rencana aksi ke depan meliputi :
 - Penyusunan anggaran yang lebih berbasis kinerja,
 - Penguatan monitoring realisasi fisik dan keuangan,
 - Peningkatan efisiensi belanja tanpa menurunkan kualitas output.Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi anggaran.

3.3. PRESTASI KINERJA LAINNYA

Pada Tahun 2025, Kecamatan Kutorejo menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta efektivitas penggunaan sumber daya. Hal ini tercermin dari terpenuhinya seluruh indikator kinerja utama dan kinerja lainnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode 2021–2025 maupun periode 2025-2029, bahkan sebagian besar melampaui target tersebut.

Berikut adalah Tabel Capaian Kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 yang bisa dibandingkan dengan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto :

Tabel III.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pemda dan Provinsi.

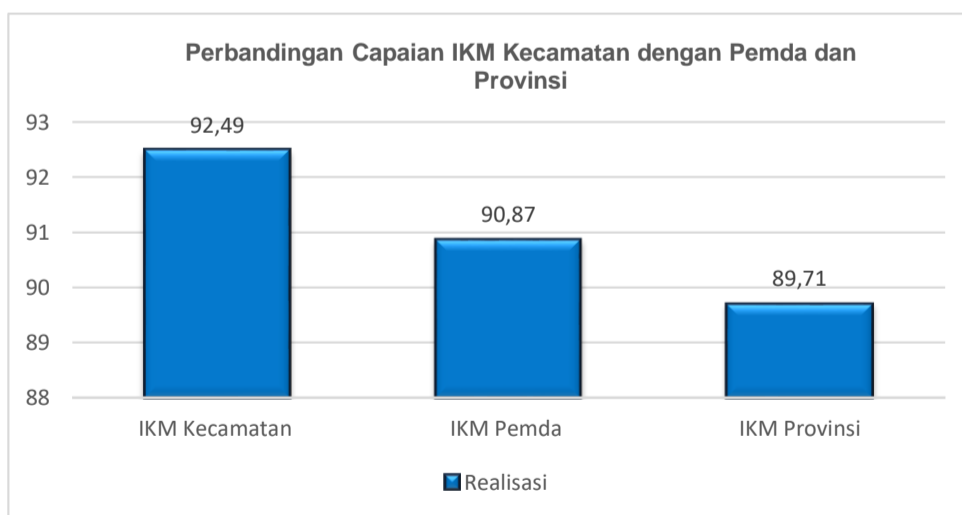
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi
1	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,49	90,87	89,71
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Jetis	83,41	75,67	-
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	n/a	n/a
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	n/a	n/a

Dari Tabel diatas hanya 2 indikator kinerja yang bisa dibandingkan dengan Pemda dan Provinsi yaitu IKM dan Nilai SAKIP.

Dalam Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kutorejo menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutorejo sebesar 92,49, yang berada di atas capaian Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar 90,87 dan juga melampaui capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 89,71.

Dengan capaian IKM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten dan provinsi, Kecamatan Kutorejo berhasil menunjukkan kinerja pelayanan publik yang kompetitif dan membanggakan, serta menjadi bukti nyata bahwa peningkatan kualitas layanan dapat dicapai secara konsisten melalui pengelolaan pelayanan.

Gambar III.1 Grafik Perbandingan IKM



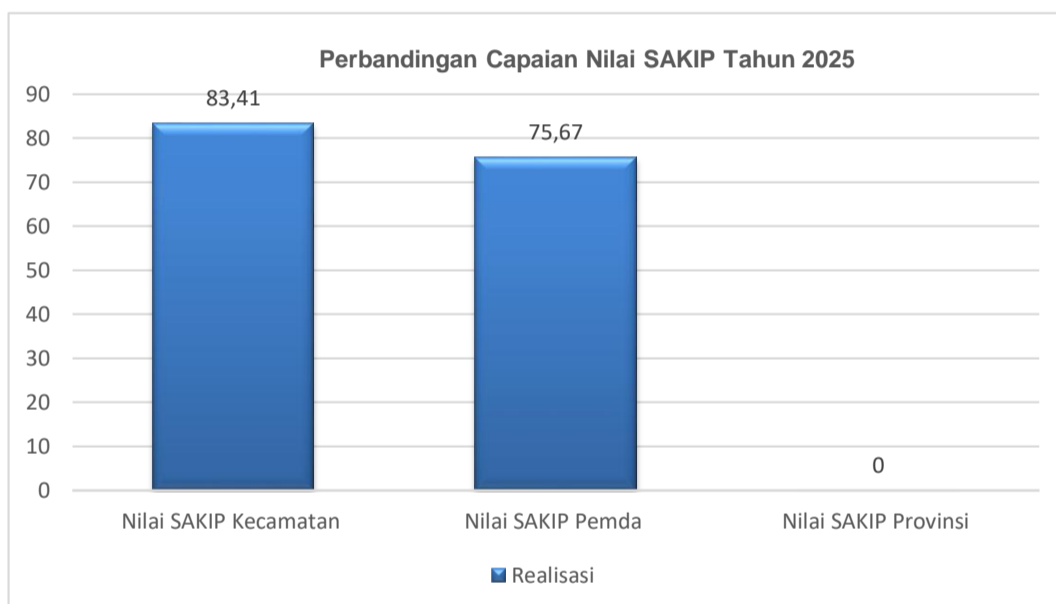
Prestasi kinerja Kecamatan Kutorejo pada tahun pelaporan tercermin dari capaian Nilai SAKIP sebesar 83,41 dengan predikat A, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 82,75. Peningkatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kecamatan Kutorejo dalam memperkuat sistem akuntabilitas

kinerja, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemanfaatan berbagai aplikasi kinerja dan perencanaan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang membantu dalam penguatan perencanaan berbasis kinerja, pemantauan realisasi program secara real-time, pengelolaan data kinerja yang lebih akurat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan.

Dengan capaian Nilai SAKIP yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, Kecamatan Kutorejo menunjukkan progres positif dalam implementasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil. Ke depan, capaian ini akan menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat budaya kinerja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Gambar III. 2 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP



a. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebesar Rp. 2.980.400.000 dengan realisasi anggaran belanja per 31 desember 2025 tercatat sebesar Rp. 2.756.402.490,00 atau sebesar 92,48% dengan rincian sebagai berikut :

Table III.8. Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.549.404.900,00	Rp. 2.348.728.090,00	92,12%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 9.000.000,00	Rp. 6.696.000,00	74,40%

3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 421.995.100,00	400.978.400,00	95,01%
----	--	-------------------	----------------	--------

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,75	92,49	98,65%	2.980.400.000,00	2.756.402.490,00	92,48%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Jetis	82,85	83,41	100,67%	2.549.404.900,00	2.348.728.090,00	92,12%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	9.000.000,00	6.696.000,00	74,40%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	421.995.100,00	400.978.400,00	95,01%
Rata-rata capaian					99,83%	Total capaian	92,48%	

Dengan capaian kinerja Kecamatan Kutorejo sebesar 99,83% dan capaian keuangan sebesar 92,48%, maka tingkat efisiensi anggaran Kecamatan Kutorejo mencapai 7,35%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja dapat direalisasikan bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kutorejo telah dilaksanakan secara efisien, di mana pemanfaatan sumber daya keuangan dilakukan secara optimal tanpa mengurangi kualitas dan capaian kinerja yang dihasilkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun pelaporan ini memiliki makna strategis bagi Kecamatan Kutorejo karena berada pada dua fase perencanaan sekaligus, yaitu sebagai tahun akhir pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2021–2025 serta sebagai tahun awal transisi menuju RENSTRA Periode 2025–2029. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan jangka menengah sekaligus pijakan awal bagi arah pembangunan kinerja pada periode selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Camat Kutorejo Tahun 2025 dengan menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 4 kinerja lainnya dengan 6 indikator kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 4 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 4 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	93,75	92,49	98,65%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,85	83,41	100,67%
		1.1 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	92,48	93,38%
		1.2 Indeks Profesionalitas ASN	84,8 (Tinggi)	84,67 (Tinggi)	99,84%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	1 Inovasi	33,33%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,75	92,49	98,65%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Capaian Kunerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,85	83,41	100,67%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan Yang Diselenggarakan Sesuai Standar	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase HASil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 2.756.402.490,00 atau sebesar 92,48% dari anggaran sebesar Rp. 2.980.400.000,00.

B. Upaya Perbaikan Kinerja

Sebagai langkah strategis untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang, Kecamatan Kutorejo akan melakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas ASN:
Melalui pelatihan, bimtek, serta pengembangan kompetensi berbasis tugas dan fungsi agar profesionalitas aparatur semakin meningkat.
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola:
Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi agar lebih efektif, efisien, dan transparan.
3. Penguatan Inovasi Layanan Publik:
Mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor:
Meningkatkan komunikasi dan sinergi antar desa, OPD, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan lintas bidang.
5. Pemantapan Tata Kelola Arsip dan Administrasi:

Guna menjawab kelemahan dalam sistem kearsipan dan pemahaman tupoksi, akan dilakukan standarisasi SOP serta sosialisasi internal secara berkala.

Selain upaya perbaikan kinerja diatas Kecamatan Kutorejo juga memanfaatkan hasil rekomendasi SAKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi:

1. Kecamatan Kutorejo akan menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku
2. Pengukuran Kinerja di Kecamatan Kutorejo telah dilakukan hingga level individu pegawai.
3. Kecamatan Kutorejo telah melengkapi laporan kinerja dengan analisis terhadap perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Provinsi.
4. Laporan kinerja telah dilengkapi dengan analisis mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.
5. Laporan Kinerja Kecamatan Kutorejo telah dilengkapi dengan analisa kegagalan pada sub kegiatan yang belum mencapai target
6. Laporan Kinerja Kecamatan Kutorejo telah membuat uraian pemanfaatan seluruh rekomendasi SAKIP dalam rangka peningkatan kinerja secara keseluruhan.
7. Laporan Kinerja Kecamatan Kutorejo telah Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas kinerja diantaranya dengan merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis

Melalui langkah-langkah tersebut, Kecamatan Kutorejo berupaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kinerja, sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Kecamatan Kutorejo berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel demi terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program

yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

PLT. CAMAT KUTOREJO

KUKUH RADIDTYO, S.H., M.H
PEMBINA
NIP. 19780306 200312 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KUTOREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kukuh Radidtyo, S.H., M.H.
Jabatan: Plt. Camat Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Camat Kutorejo
Kabupaten Mojokerto

Kukuh Radidtyo, S.H., M.H..
Pembina / IVa
NIP 197803062003121004

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KUTOREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	93,75

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,85
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84,8 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penujiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.566.932.000	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 10.000.000	APBD 2025
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 190.000.000	APBD 2025

Mojokerto, 24 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Plt. Camat Kutorejo
Kabupaten Mojokerto


Muhammad Albarraa


Kukuh Radityo, S.H., M.H..
Pembina / Iva
NIP 197803062003121004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KUTOREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kukuh Radidtyo, S.H., M.H
Jabatan: Plt. Camat Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Plt. Camat Kutorejo
Kabupaten Mojokerto

Muhammad Albarraa

Kukuh Radidtyo, S.H., M.H
Pembina / IVa
NIP 197803062003121004

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KUTOREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,75
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,85
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.549.404.900	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 9.000.000	PAPBD 2025
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 421.995.100	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Pit. Camat Kutorejo
Kabupaten Mojokerto


Muhammad Albarraa


Kuku Radidtyo, S.H., M.H
Pembina / iVa
NIP 197803062003121004

